

PENINGKATAN PENERAPAN SNI GUNA MENINGKATKAN DAYA SAING INDONESIA MENGHADAPI AEC (ASEAN ECONOMIC COMMUNITY) 2015

**Oleh
Gilang Hamzah Akbar**

Abstrak

Pada tahun 2015, Indonesia akan menghadapi AEC (*ASEAN Economy Community*), yang memberlakukan free flow dan penghapusan tarif pada berbagai sektor produksi dan perdagangan antar negara ASEAN. Penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) secara optimal merupakan langkah awal Indonesia untuk menjawab tantangan tersebut. Dimana produk-produk yang berkualitas SNI tentunya memiliki daya saing yang lebih baik. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keefektifan regulasi teknis melalui pemberlakuan wajib SNI, hambatan penerapannya dan mengoptimalkan penerapan SNI dalam mempersiapkan Indonesia menghadapi AEC 2015. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa belum optimalnya penerapan SNI di Indonesia yang dibuktikan dengan hasil pengolahan data BSN. Keterbatasan yang dihadapi para produsen di Indonesia yakni minimnya sumber daya manusia yang memadai dalam menerapkan sistem manajemen mutu serta biaya pengujian/sertifikasi yang masih cenderung mahal. Dengan demikian, berbagai pelatihan, seminar dan workshop harus semakin digalakkan untuk meningkatkan potensi SDM dalam menerapkan SNI secara lebih optimal.

Keywords: AEC, daya saing, kualitas, SNI, sumber daya manusia

I PENDAHULUAN

ASEAN summit pada tahun 1997 yang diselenggarakan di Kuala Lumpur membuat suatu kesepakatan yang disebut ASEAN VISION 2020. Dimana kesepakatan tersebut bertujuan untuk mewujudkan stabilitas kawasan ASEAN yang berdaya saing tinggi dan didukung pemerataan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan kesepakatan tersebut pula, kemudian Komunitas ASEAN dibentuk, yang memiliki tiga pilar utama berupa ASEAN Security Community, ASEAN Economic Community, dan ASEAN Socio-

Cultural Community. Pimpinan negara-negara anggota ASEAN kemudian menyepakati untuk mempercepat penerapan tersebut pada tahun 2015. Percepatan tersebut dilakukan untuk menyesuaikan tuntutan iklim globalisasi internasional yang menjadi semakin kompetitif (Djani, 2007).

Sebagai negara dengan wilayah geografis paling luas dan jumlah penduduk terbesar di kawasan ASEAN, Indonesia dinilai cukup berpotensi untuk menguasai basis produksi di antara negara-negara anggota ASEAN. Dimana hal tersebut

tentunya akan membawa dampak pertumbuhan ekonomi nasional yang tinggi dan berkesinambungan. Adapun untuk mencapai kondisi tersebut, diperlukan standardisasi dan penilaian kesesuaian sebagai pondasi utama dalam penetapan dan penerapan aturan-aturan teknisnya (Setiadi, 2010). Dengan diwajibkannya pemberlakuan SNI oleh pemerintah Indonesia, merupakan upaya perlindungan bagi para industri maupun konsumennya (Herjanto, 2011).

Untuk mendukung hal tersebut pula, diperlukan kajian secara komprehensif terhadap standar teknik itu sendiri, serta aspek regulasi, manajemen, institusi, dan dunia usaha (ekonomi) yang dapat mempengaruhi efektifitas pemberlakuannya. Pengukuran tingkat keberhasilan pemberlakuan SNI dapat dilakukan dengan memantau penerapannya di lapangan seperti pada alat dan bahan baku, proses produksi, pengujian mutu kualitas, serta bahan ajar dalam pendidikan ataupun pelatihan. Dengan demikian, peningkatan dalam penerapan SNI perlu terus dilakukan dan didukung oleh berbagai pihak terkait, guna meningkatkan mutu produk Indonesia.

Dengan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat mengetahui regulasi

teknis melalui penerapan SNI secara wajib, hambatan dalam penerapan SNI, dan untuk mengetahui efektifitas regulasi teknis melalui pemberlakuan wajib SNI, hambatan penerapannya dan mengoptimalkan penerapan SNI dalam mempersiapkan Indonesia menghadapi AEC 2015.

II TINJAUAN PUSTAKA

SNI merupakan suatu dokumen yang ditetapkan oleh BSN dan disusun secara konsensus dengan meliputi empat unsur stakeholder, yakni regulator industri, konsumen, dan pakar. SNI mengatur berbagai pedoman dan persyaratan teknis untuk mengatur standardisasi suatu proses maupun produk dari suatu objek pengukuran. SNI akan dikaji ulang setiap periode tertentu agar dapat digunakan secara terus menerus oleh berbagai pihak (BSN, 2013a).

Kemajuan perindustrian di Indonesia saat ini telah mampu memenuhi berbagai kebutuhan baik dalam negeri maupun luar negeri. Dengan dukungan pemerintah pusat maupun daerah, industri nasional dapat terus berkembang dalam peningkatan mutu dan kualitas produk yang dihasilkannya. Mutu produk berperan penting dalam meningkatkan nilai jual produk itu sendiri. Posisi Indonesia sebagai

negara anggota ASEAN, menuntut para produsen dalam negeri untuk memahami dan mematuhi standar nasional maupun internasional yang telah ditetapkan. Peningkatan globalisasi perdagangan memunculkan dampak positif maupun negatif terhadap industri nasional. Penerapan berbagai regulasi teknis seperti pemberlakuan wajib SNI, merupakan upaya pemerintah dalam mencegah masuknya produk-produk impor yang bermutu rendah. Hal tersebut dilakukan untuk melindungi konsumen maupun produsen dalam negeri (Herjanto, 2011).

Nilai tambah suatu produk yang menggunakan bahan dasar impor juga harus memenuhi persyaratan kualitas yang telah ditetapkan oleh standar nasional maupun internasional (Habibie, 2010).

Indonesia menghadapi beberapa tantangan ekonomi seiring waktu menuju AEC 2015, diantaranya:

1. Indonesia akan menghadapi persaingan ekspor dan impor yang semakin meningkat, terutama antar sesama negara-negara anggota ASEAN
2. Tingkat inflasi di Indonesia yang cenderung lebih tinggi dibanding dengan negara lain di kawasan ASEAN
3. Kondisi geografis di kawasan ASEAN yang cenderung sama, memunculkan

pengaruh produk yang dihasilkanpun cenderung homogen. Seperti halnya di sektor pertanian, perikanan, produk berbahan dasar karet, produk berbahan dasar kayu, dan elektronik

4. Sumber daya manusia juga berperan penting dalam memajukan perekonomian. Tenaga kerja di Indonesia dinilai belum memiliki daya saing yang cukup baik jika dibandingkan dengan tenaga kerja asing dari negara-negara kawasan ASEAN
5. Kepentingan nasional juga selalu menjadi pertimbangan Indonesia dalam rangka integrasi ekonomi. Dimana kepentingan nasional masing-masing negara harus selalu dijaga oleh pemerintahan setempat.

Spesifikasi teknis yang dibakukan dalam standar, termasuk juga tata cara dan metode yang telah tersusun secara konsensus, menjadi standar memiliki peran penting bagi berbagai pihak terkait. Standar yang telah ditetapkan tersebut tentunya telah memperhatikan berbagai aspek kesehatan dan keselamatan makhluk hidup di sekitarnya, pelestarian lingkungan, perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, serta arah perkembangan

yang telah dipersiapkan untuk masa yang akan datang.

Dalam hal inovasi produk, dokumen standardisasi akan menjadi acuan dalam pengaturan penggunaan produk dan penyediaan bahasa maupun ukuran, guna mengurangi waktu pemasaran produk antar negara. Disamping itu, standar juga berperan dalam keamanan produk yakni dengan mengurangi resiko kesalahan penggunaan produk. Penerapan standar yang sama juga dapat meminimalisir kenaikan biaya produksi untuk optimalisasi dan penyesuaian produk.

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam penerapan standar produk impor maupun ekspor adalah peningkatan produk ke pasar global. Dimana standar dapat menghindarkan terjadinya trade barriers, serta memfasilitas pasar baru dan perdagangan antar negara. Terkait dengan manajemen resiko, penerapan standar akan meminimalisir berbagai ketidakpastian dalam pemasaran maupun pendistribusian, serta mendukung program ramah lingkungan bagi tiap industri yang menerapkannya (Setiadi, 2010).

Dengan demikian, penerapan SNI bagi industri dalam negeri diharapkan akan mencapai mutu sesuai SNI dan mencapai karakteristik keunggulan mutu sesuai

tujuan pada saat SNI tersebut dirumuskan, yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan daya saing produk tersebut dan dampak positif lainnya bagi perekonomian Indonesia (Setiadi, 2010).

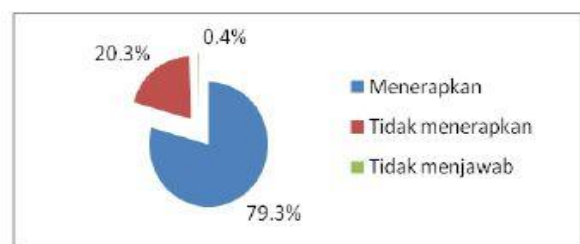
III METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian melalui berbagai studi literatur dan menggunakan data sekunder yang didapat dari jurnal dan web instansi yang terkait.

IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan Standar di Indonesia

Sistem Manajemen Mutu (SMM) adalah suatu sistem yang diperlukan dalam membangun manajemen mutu dalam perusahaan sehingga mampu beroperasi dan memproduksi sesuai dengan mutu yang dipersyaratkan. Sistem manajemen mutu juga menjadi salah satu syarat yang diperlukan dalam SNI.



Gambar 1. Penerapan Sistem Manajemen Mutu (Herjanto, 2011).

Berdasarkan Gambar 1, diketahui bahwa dari 447 perusahaan yang menjadi responden dalam suatu kajian survei, 79,3% diantaranya mengakui telah menerapkan standar berupa Sistem Manajemen Mutu yang merujuk pada BSN-10 dan ISO 9001. Sedangkan 20,3% diantaranya menyatakan belum menerapkan sistem manajemen mutu, dan sisanya sebanyak 0,4% tidak menjawab.

Penerapan Sistem Manajemen Mutu di suatu industri nasional merupakan hal utama yang dipertimbangkan oleh para pelaku industri. Walaupun terdapat penambahan biaya dalam awal penerapannya, namun upaya ini menjadi kewajiban bagi tiap pelaku industri untuk perbaikan secara terus menerus. Dalam jangka panjang, penerapan Sistem Manajemen mutu akan mengurangi pemborosan dari produk-produk

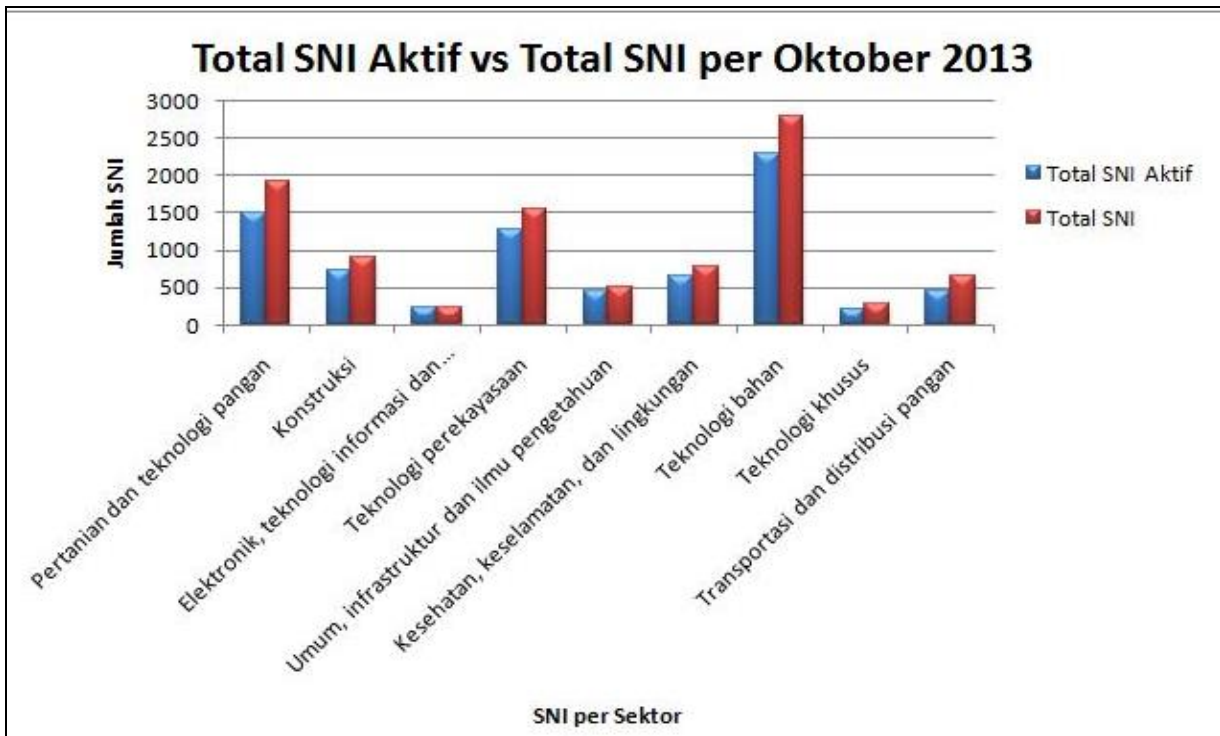
cacat yang tentunya akan merugikan citra kualitas dari pelaku industri tersebut (Gunawan, 2009).

Penerapan Standar Nasional Indonesia di Setiap Sektor

SNI adalah dokumen yang disusun secara konsensus oleh panitia teknis yang terdiri dari empat unsur stakeholder (regulator, industri, konsumen dan pakar) yang ditetapkan oleh BSN. SNI mengatur berbagai pedoman dan persyaratan teknis untuk mengatur standarisasi suatu proses maupun produk dari suatu objek pengukuran. SNI akan dikaji ulang setiap periode tertentu agar dapat digunakan secara terus menerus oleh berbagai pihak (BSN, 2013a).

Tabel 1. Data Total SNI Aktif dan Total SNI (BSN, 2013b)

No	SNI Per Sektor	Baru	Revisi	Terjemahan	Amandemen	Abolisi	Total SNI Aktif	Total SNI	persentase
1	Pertanian dan teknologi pangan	1096	403	0	4	1503	1503	1919	78.32%
2	Konstruksi	583	149	1	3	177	736	913	80.61%
3	Elektronik, teknologi informasi dan komunikasi	215	6	0	0	2	221	223	99.10%
4	Teknologi perekayasaan	1196	74	0	2	275	1272	1547	82.22%
5	Umum, infrastruktur dan ilmu pengetahuan	415	32	0	1	57	448	505	88.71%
6	Kesehatan, keselamatan, dan lingkungan	601	60	0	1	125	662	787	84.12%
7	Teknologi bahan	1892	384	6	5	496	2287	2783	82.18%
8	Teknologi khusus	157	55	2	0	68	214	282	75.89%
9	Transportasi dan distribusi pangan	430	30	0	1	204	461	665	69.32%



Gambar 2. Histogram Total SNI Aktif vs Total SNI (BSN, 2013b)

Dari data BSN per bulan Oktober 2013 diperoleh dari sektor pertanian dan teknologi pangan menerapkan SNI sebesar 78,32% dari total SNI, sektor konstruksi menerapkan SNI sebesar 80,61% dari total SNI, sektor elektronik, teknologi informasi dan komunikasi menerapkan SNI sebesar 99,10% dari total SNI, sektor teknologi perkerjasama menerapkan SNI sebesar 82,22% dari total SNI, sektor umum, infrastruktur dan ilmu pengetahuan menerapkan SNI sebesar 88,71% dari total SNI, sektor kesehatan, keselamatan, dan lingkungan menerapkan SNI sebesar 84,12% dari total SNI, sektor teknologi bahan menerapkan SNI sebesar 82,12% dari total SNI, sektor teknologi khusus

menerapkan SNI sebesar 75,89% dari total SNI, sektor transportasi dan distribusi pangan menerapkan SNI sebesar 69,32% dari total SNI.

Dari data tersebut penerapan atau penggunaan SNI belum optimal diterapkan di hampir semua sektor. Agar dapat menerapkan SNI secara optimal terlebih dulu harus mengetahui kendala kendala dalam penerapannya, yang kemudian melakukan cara cara yang harus dilakukan agar penerapan SNI nya optimal. Dengan menerapkan SNI secara optimal diharapkan dapat meningkatkan daya saing Indonesia menghadapi AEC 2015.

Hambatan dalam Penerapan SNI

Dari hasil survei yang dilakukan oleh Herjanto 2011, dapat disimpulkan bahwa dalam menerapkan SNI perusahaan menghadapi beberapa kendala, antara lain keterbatasan sumber daya manusia dalam menerapkan SMM (30,0%), kesulitan untuk mengkalibrasikan peralatan laboratorium maupun produksi (14,8%), adanya pesaing pasar yang memasarkan produknya di bawah standar dengan harga yang rendah pula (13,0%), biaya pengujian/ sertifikasi mahal (12,5%), kepedulian konsumen terhadap standar yang kurang (10,1%), proses sertifikasi tidak mudah (7,4%), lokasi laboratorium/inspeksi/lembaga sertifikasi jauh dari perusahaan (6,0%), dan faktor lain (6,3%) misalkan kurangnya sosialisasi sistem manajemen mutu di industri.



Gambar 3. Hambatan Penerapan SNI (Herjanto, 2011)

Cara Meningkatkan Penerapan SNI

Peningkatan penerapan SNI di semua sektor sangat penting dilakukan. Dengan adanya penerapan SNI secara optimal merupakan salah cara untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia dalam menghadapi AEC 2015. Disamping itu, penerapan SNI di Indonesia juga sebagai upaya untuk membendung serbuan produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri, yang juga merupakan dampak dari adanya AEC tersebut.

Dengan menerapkan SNI juga berarti menerapkan *best-practice guidelines* untuk meningkatkan efisiensi, memperbaiki kualitas dan keamanan produk yang dihasilkan sehingga dapat membuka pasar baru, serta adanya peluang untuk mengadopsi teknologi baru guna meningkatkan volume produksi. Di samping itu, penerapan standar juga akan meningkatkan nilai perusahaan di mata konsumen, karena konsumen percaya baik terhadap proses produksi maupun kualitas produk yang dihasilkan.

Cara untuk meningkatkan penerapan SNI, yaitu:

1. Melakukan pengembangan upaya upaya sosialisasi secara masif dan sistematis untuk memastikan potensi, efektivitas dan manfaat SNI wajib

tersampaikan pada semua pemangku kepentingan.

2. Melakukan penelitian pasar untuk mengetahui pemenuhan persyaratan SNI pada produk SNI Wajib dan produk non SNI Wajib yang telah menggunakan tanda SNI. Hal ini diduga karena besarnya kemungkinan terjadinya distorsi pasar yang dilakukan oleh produsen “nakal” dan masuknya barang-barang selundupan di pasar domestik.
3. Menambah berbagai fasilitas pendukung, seperti halnya fasilitas Laboratorium Uji dan Lembaga Sertifikasi Produk pada lokasi yang strategis.
4. Meningkatkan penyelenggaraan pembinaan teknis dalam bentuk peningkatan manajemen dan teknologi untuk meningkatkan kemampuan industri dalam memenuhi syarat mutu SNI.
5. Meningkatkan penyelenggaraan pelatihan, seminar dan *workshop* tentang SNI di berbagai sektor terkait untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusianya. Sosialisasi SNI juga dapat mulai diberikan sejak dini, yakni kepada para pelajar tingkat

menengah dan atas, maupun mahasiswa tingkat perguruan tinggi.

6. Memberikan *reward and punishment* kepada para pelaku industri dalam negeri. Hal ini dapat dilakukan dengan memberi apresiasi atau penghargaan kepada pelaku industri yang menerapkan SNI dengan baik dan adanya penegakkan hukum bagi pelaku industri yang tidak menerapkan SNI.
7. Melakukan promosi SNI secara masif.

V KESIMPULAN

Penerapan SNI dalam setiap sektor di Indonesia dapat dikatakan belum optimal. Hal ini dibuktikan dengan data BSN yang menyatakan masih banyaknya SNI yang belum diterapkan di setiap sektor. Optimalisasi penerapan SNI sangat penting, karena dengan menerapkan SNI secara optimal merupakan salah cara untuk meningkatkan daya saing produk Indonesia dalam menghadapi AEC 2015 dan membendung serbuan produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri akibat AEC tersebut.

Hambatan yang dihadapi produsen dalam menerapkan SNI yaitu, keterbatasan sumber daya manusia dalam menerapkan sistem manajemen mutu, kesulitan untuk mengkalibrasikan peralatan laboratorium

maupun produksi, adanya pesaing pasar yang memasarkan produknya di bawah standar dengan harga yang rendah, biaya pengujian atau sertifikasi mahal, kepedulian konsumen terhadap standar yang kurang, proses sertifikasi tidak mudah, lokasi untuk laboratorium, inspeksi maupun lembaga sertifikasi jauh dari perusahaan. Terdapat pula faktor lainnya seperti misalnya kurangnya sosialisasi sistem manajemen mutu di industri.

Adapun beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerapan SNI yaitu, melakukan pengembangan upaya sosialisasi secara masif dan sistematis untuk memastikan potensi, efektivitas dan manfaat SNI wajib tersampaikan pada semua pemangku kepentingan, melakukan penelitian pasar untuk mengetahui pemenuhan persyaratan SNI pada produk SNI Wajib dan produk non SNI Wajib yang telah menggunakan tanda SNI.

Disamping itu, usaha lainnya yang dapat dilakukan diantaranya yakni dengan menambah fasilitas Laboratorium Uji dan Lembaga Sertifikasi Produk pada lokasi yang tepat, melakukan pembinaan teknis dalam bentuk peningkatan manajemen dan teknologi untuk meningkatkan kemampuan industri dalam memenuhi syarat mutu SNI,

meningkatkan penyelenggaraan berbagai pelatihan, seminar dan workshop tentang SNI untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor-sektor terkait, adanya reward and punishment kepada para pelaku industri dalam negeri, dan melakukan promosi-promosi SNI secara masif.

DAFTAR PUSTAKA

- BSN 2013a, Badan Standarisasi Nasional Indonesia, diakses pada 7 Desember 2013, <http://bsn.go.id/main/sni/isi_sni/5>.
- BSN 2013b, Badan Standarisasi Nasional Indonesia, diakses pada 7 Desember 2013, <http://bsn.go.id/main/sni/isi_sni/21>.
- Bustami, G 2010, *Menuju ASEAN Economic Community 2015*, Departemen Perdagangan Republik Indonesia, Diakses pada 7 Desember 2013, <http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/Umum/Setditjen/Buku%20Menuju%20ASEAN%20ECONOMIC%20COMMUNITY%202015.pdf>.
- Djani, T 2007, *ASEAN Selayang Pandang*, Dir. Jen. Kerjasama ASEAN Departemen Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta.
- Gunawan, YH 2009. "Manfaat Penerapan Peraturan melalui Standardisasi", dalam *Standardisasi dan Regulasi Teknis di Bidang Industri* (eds), Jakarta.

Habibie, BJ, 2010, *Jejak Pemikiran Habibie*, Mizan, Jakarta Selatan.

Herjanto, E, 2011, “Pemberlakuan SNI Secara Wajib di Sektor Industri: Efektivitas dan Berbagai Aspek dalam Penerapannya”, *Jurnal Riset Industri*, vol. V, no.2, p. 121.

Setiadi, B, 2010, “Nasionalisme di Era Globalisasi Dengan Standar Nasional Indonesia (SNI)”, *Jurnal Sekretariat Negara RI*, no.17.

RIWAYAT PENULIS

Gilang Hamzah Akbar, S.T., M.Sc.

Lahir di Tasikmalaya, 13 Maret 1990

S1 Teknik Industri Institut Teknologi
Indonesia

S2 Teknik Industri Universitas Gadjah Mada

Dosen Tetap Yayasan Pendidikan Galuh
Ciamis pada Program Studi Teknik Industri
Fakultas Teknik Universitas Galuh Ciamis.